

Peran Agama-Agama dalam Menghadapi Tantangan Fundamentalisme Agama sebagai Buah dari Benturan Antarperadaban

Oleh: Frano Kleden

1. Pendahuluan

Tentang realitas kehidupan manusia yang beraneka ragam di dunia ini, Hans Küng, teolog terkemuka Swiss, dalam bukunya *Etika Global* sebagaimana dikutip Rikard Kristian Sarang, berujar, “Tak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama”.¹ Pernyataan ini memiliki nuansa yang amat kaya. Di satu pihak mau dikatakan bahwa perdamaian antaragama menjadi prasyarat bagi perdamaian dunia. Namun di pihak lain, perdamaian dunia tersebut sekaligus pula merupakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian antaragama. Tidak disangkal lagi bahwa agama dan aspek-aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat saling tergantung: satu mempengaruhi yang lain atau satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa subjek yang lain.

Tentangan terbesar manusia pada abad ini adalah bagaimana menghadapi keanekaragaman konteks situasi, termasuk keanekaragaman agama dan kebebasan untuk menghayati serta memeluk agama. Di samping menjadi sarana pembawa perdamaian, keberadaan agama dalam ruang publik ternyata dapat menimbulkan ketegangan di antara tiga hal, yakni hubungan antara warga yang beriman dan yang sekuler, hubungan antara warga dari satu agama dengan warga dari agama lain, dan hubungan antara kelompok agama dan negara.

Dalam konteks politik Indonesia, kita tentu masih ingat bagaimana gelombang penolakan dari kaum Muslim terhadap Ahok (seorang Kristen) yang ingin maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Atau mungkin kita masih ingat peristiwa 8 Februari 2011 lalu. Ketika presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Gong Perdamaian di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada hari yang sama, Temanggung terbakar kerusuhan SARA. Sekelompok umat ingin mengeksekusi sendiri terdakwa penistaan agama, Antonius R. Bawean setelah kecewa pada putusan jaksa yang menuntut lima tahun penjara. Dalam sekejap kerusuhan meluas. Massa membakar dua gereja dan merusak sekolah. Dua hari sebelumnya lebih tragis. Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dibantai. Sekitar 25 anggota Jamaah Ahmadiyah dikepung oleh sekitar 1.500 orang dengan senjata mematikan. Sepertinya mereka dikepung karena ‘konsensus kebencian’ yang menyebar padahal mereka sama sekali tak

¹ Rikard Kristian Sarang, “Dialog Antaragama sebagai Model Penerimaan, Pengakuan terhadap Keberagaman dalam Terang Pemikiran Paul F. Knitter”, *Jurnal Berbagi*, 2:1 (Ledalero, Januari 2013), hlm. 78.

mengenai orang-orang yang menyerang mereka. Mereka diburu hanya karena identitas keyakinan: Ahmadiyah.²

Kasus pembantaian Ahmadiyah di Pandeglang dan perusakan gereja di Temanggung serta penolakan kelompok muslim terhadap Ahok di atas adalah fundamentalisme ekstrem yang tak bisa ditolerir. Ini hanyalah contoh-contoh kasus yang diangkat sebagai sampel untuk menunjukkan bahwa di alam demokrasi Indonesia, selain merebaknya kepentingan politik kekuasaan serta kapitalisme yang bercumbu rayu dengan puritanisme, virus fundamentalisme agama sudah mewabah dan susah untuk disembuhkan. Perda-perda berbasis agama merebak di sejumlah daerah, larangan terhadap keberadaan kelompok minoritas meluas, penolakan terhadap kepala daerah yang tak seiman dan seetnis menggejala, pengkafiran menjadi bahasa yang ringan untuk dihantamkan ke sesama yang tak seimam, pluralisme dan segala hal yang berbau kiri pun diharamkan.

Menguatnya fundamentalisme agama harus segera diatasi oleh organisasi agama-agama. Keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang dibangun atas pluralisme harus tetap dijaga. Organisasi lintas agama yang nasionalistik harus bekerja sama demi menjaga Indonesia yang telah susah payah dibentuk dan dipelihara hingga kini. Nilai-nilai keindonesiaan tidak boleh tergantikan dengan paham-paham keagamaan yang belum tentu cocok. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis dalam karya ilmiah ini memilih judul: “Peran Agama-Agama dalam Menghadapi Tantangan Fundamentalisme Agama sebagai Buah dari Benturan Antarperadaban”.

Artikel ini pertama-tama berusaha menggali akar penyebab tumbuh dan berkembangnya fenomena fundamentalisme agama di Indonesia. Dan, salah satu akar penyebab yang coba dikaji secara lebih jauh dalam artikel ini ialah faktum benturan antarperadaban. Di akhir artikel ini, sebagai sebuah solusi penting, penulis akan menyajikan peran agama-agama dalam menghadapi fenomena fundamentalisme agama sebagai sumbangan bagi peradaban manusia zaman ini.

2. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kepustakaan di mana penulis menganalisis segala data sekunder. Berkaitan dengan metode ini, pertama-tama tentu saja penulis mengunjungi perpustakaan buku (perpustakaan Ledalero) dan mendatangi toko buku untuk mendapatkan buku-buku sumber tentang agama, peradaban dan

² Teuku Kemal Fasya, “Pluralisme Vs Fundamentalisme”, *Kompas* [Jakarta], 14/02/2011.

fundamentalisme. Penulis juga berusaha membaca dan menemukan di media massa, pelbagai informasi atau hal-hal seputar paham fundamentalisme agama beserta kasus-kasus fundamentalis yang terjadi dan mencoba menganalisa secara baik dan kritis data tersebut.

3. Peran Agama-Agama dalam Menghadapi Fenomena Fundamentalisme Agama: Sebuah Sumbangan bagi Peradaban Manusia

3.1 Fundamentalisme Agama di Indonesia

Dewasa ini gerakan fundamentalis keagamaan sebagai gerakan sosial yang amat menyita perhatian masyarakat tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat beragama Islam³, tetapi juga di kalangan umat Kristen, Yahudi atau pun Hindu dan Budha. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa gerakan fundamentalis tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengacu pada isi teologis suatu agama. Hal ini perlu ditegaskan terkait dengan stigmatisasi yang selalu dilekatkan pada Islam bahwa Islam pada dirinya sendiri memiliki tendensi fundamentalis.⁴ Terlepas dari itu, sejatinya ada beberapa gejala intoleran yang menyebabkan simptom fundamentalisme (agama) tumbuh subur di Indonesia lantas menguasai ruang publik di negeri demokrasi ini.

3.1.1 Persoalan identitas

Konsep identitas sangat berkaitan dengan pertanyaan, “Siapakah aku/kita?” dan “Di manakah posisi aku/kita?” Dewasa ini agama merupakan satu sumber dari identitas. Dalam

³ Keberadaan fundamentalisme Islam di Indonesia dapat ditemui dalam kelompok-kelompok seperti Front pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (FKASWJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Ismatillah A. Nu'ad, *Fundamentalisme Progresif* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. xxxiii.

⁴ Istilah fundamentalisme Islam merupakan stigma Barat terhadap beberapa gerakan atau figur Islam kontemporer, terutama pasca-revolusi Iran 1978-1979. Paham ini dianggap mengandung ciri-ciri yang bersifat reaktif dan oposisional bahwa fundamentalis melawan (*fight back*) berbagai ancaman yang diterima oleh tradisi dan identitas mereka; mereka memperjuangkan (*fight for*) prinsip-prinsip, kebijakan, program yang menjanjikan tercapainya tujuan-tujuan mereka; mereka berjuang dengan (*fight with*) sumber-sumber, “senjata yang paling baik untuk memperkuat identitas, menjaga keutuhan gerakan, membangun pertahanan di sekitar mereka, dan menjaga jarak dari pihak lain”. Fundamentalis terutama berjuang melawan siapa pun dan apa pun, (biasanya modernitas sekular) segala ancaman terhadap “apa yang mereka kasih”. Akhirnya mereka berperang atas nama (*fight under*) Tuhan dalam agama-agama teistik, atau atas nama simbol-simbol transendental. Denny F. Mathewson, “The Fundamentalism Project: An Islamic Studies Scholar's Perspective”, *Religious Studies Review*, 24:1 (1998), hlm. 9. Sehubungan dengan ini, Hassan Hanafi, filsuf dan pemikir Muslim kontemporer menolak pengertian-pengertian negatif seperti anggapan para sarjana Barat. Dengan caranya sendiri, Hanafi menjelaskan bahwa fundamentalisme Islam adalah pencarian ‘landasan’ atau ‘norma praktis’ dalam agama. Hanafi agaknya ingin mengatakan bahwa penerapan istilah fundamentalisme dalam pengertian Barat harus dihindari karena toh setiap Muslim harus fundamentalis dalam artian berpegang teguh pada fundamen-fundamen agamanya. Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan- Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut Hassan Hanafi* (Jakarta: TERAJU, 2002), hlm. 85.

bukunya berjudul *Identity and Violence: The Illusions of Destiny*, Amartya Sen⁵ mengatakan bahwa solidaritas dan simptom kebebasan sebagai buah demokratisasi melahirkan komunitas-komunitas terintegrasi dan eksklusif sebagai respons dari lingkungan sosial politik yang berubah cepat, sehingga perilaku demokratis seringkali bersinggungan dengan perilaku bermusuhan. Permusuhan yang timbul dari sikap eksklusif bisa berjalan bergandengan tangan dengan manfaat yang timbul dari sikap eksklusif itu. Kecenderungan ini membangun solidaritas kuat pada satu kelompok berbasis aliran atau identitas tertentu, namun pada saat yang sama upaya menguatkan solidaritas dan pematuhan terhadap nilai-nilai internal itu dilakukan dengan cara memusuhi dan bertindak kasar terhadap kelompok lain.⁶

Fokus pada identitas sendiri bisa bersifat negatif. Negatif dalam arti bahwa fokus yang begitu eksklusif pada identitas sendiri bisa berakar dalam suatu persepsi mendalam bahwa “kami (kelompok kami) selalu dirugikan, dinista, tidak diakui” atau bahwa “kami korban ketidakadilan”. Dasar politik identitas adalah sentimen. Tuntutan bahwa pimpinan harus “beragama ini/itu” tanpa melihat kompetensinya merupakan sebuah politik identitas agama. Dan dalam komunitas agama, apabila perasaan kelompok agama tertentu selalu dikalahkan, maka mereka akan terdorong luas untuk menyatakan diri dan meledak.⁷

Persoalan identitas sesungguhnya juga tak lepas dari fenomena fundamentalisme yang terkait dengan regangan proses globalisasi yang disebut telah memunculkan individualisme baru sehingga memicu hadirnya tradisi dan ritual. Dari proses itu, maka tidak heran globalisasi memicu lahirnya identitas baru yang memproduksi aneka kemungkinan dan identifikasi posisi baru.⁸ Globalisasi memperanakan identitas palsu, penuh pencitraan. Pertarungan politik identitas juga menciptakan ilusi-ilusinya tersendiri. Manusia atau warga masyarakat tiba-tiba dipaksa memilih ke dalam salah satu identitas tunggal yang mutlak berdasarkan aliran-aliran keagamaan atau pandangan tertentu. Amartya Sen menyebut fenomena ini sebagai pendekatan

⁵ Amartya Kumar Sen lahir pada 3 November 1933. Ia adalah seorang ekonom India yang menjadi terkenal karena karyanya tentang kelaparan, teori perkembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar dari kemiskinan dan liberalisme politik. Ia pernah menerima penghargaan nobel dalam bidang ekonomi atas karyanya dalam ekonomi kesejahteraan pada 1998 dan Penghargaan Keberhasilan Seumur Hidup (*Lifetime Achievement Award*) oleh Kamar Dagang India pada tahun 2003. Bdk. *Amartya Sen* (Online), (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen, diakses pada 23 Maret 2017).

⁶ Mohammad Burhanudin, “Intoleransi, Setan yang Tak Sendirian”, *Kompas* [Jakarta], 02/03/2016.

⁷ Franz Magnis Suseno (pengantar) dalam Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. iv-v.

⁸ Globalisasi menjangkau semua orang di seluruh dunia untuk saling berhubungan. Globalisasi selalu berusaha menciptakan keseimbangan tetapi yang tercipta justru berbagai paradoks. Salah satu paradoks mengungkap bahwa globalisasi tidak menciptakan budaya (dan agama) yang semakin menyatu (rukun dan toleran), tapi yang semakin beragam (radikal dan potensial untuk konflik). Philipus Tule, “Agama-Agama di Indonesia Menghadapi Tantangan Radikalisme dan Globalisasi” dalam Paul Budi Kleden, dkk. (Ed.), *Allah Menggugat-Allah Menyembuhkan*, (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 390.

soliteris terhadap identitas manusia. Pendekatan ini memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata.⁹

3.1.2 Kehidupan Sosial Ekonomi yang Semrawut

Apa korelasi antara ketimpangan ekonomi dengan meningkatnya fundamentalisme di Indonesia? Dalam perkembangannya, silang sengkabut persoalan ekonomi politik dapat menyemai dan memberi tempat bagi bertumbuhnya gerakan-gerakan fundamentalisme. Ketimpangan ekonomi yang kian menganga menandakan berlipatnya jumlah penduduk yang tersingkirkan dari perputaran sebagian besar kue ekonomi. Hal itu rawan memicu kekecewaan-kekecewaan dan frustrasi sosial-ekonomi masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, reformasi menghadirkan kebebasan dari kekangan rezim otoritarian, termasuk terbebasnya simpul-simpul identitas yang dulu tertindas. Sen mengatakan bahwa dalam frustrasi sosial-ekonomi, identitas menjadi begitu penting sebagai tempat persembunyian yang nyaman. Tak sedikit di antara kelompok masyarakat yang kecewa dan tersingkir, akhirnya memilih bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan yang juga tumbuh subur pada era reformasi ini. Dalam praktiknya mereka kerap kali menginterpretasikan identitas keagamaan yang fundamentalis. Fundamentalisme religius ini, menurut Sen, merupakan konstruksi identitas di bawah identifikasi perilaku individu dan lembaga-lembaga sosial kepada aturan yang diturunkan Tuhan, diinterpretasikan oleh otoritas keagamaan yang menjadi perantara hubungan Tuhan dengan manusia. Inilah yang membuahkan terjadinya reduksi dunia sebagai federasi agama yang memicu konflik berbasis afiliasi tunggal keagamaan.¹⁰

Bagi warga biasa, dalam kondisi kesenjangan sosial yang tajam, individu merasa tidak pasti dengan identitasnya dan condong berlindung dalam narsisme dan triumfalisme agamanya. Fanatisme adalah satu-satunya 'kekuatan kehendak' yang dimiliki oleh mereka yang lemah. Bagi si lemah ini tidak ada rasa kepastian lebih besar daripada yang dapat diberikan sebuah kelompok yang mengklaim kebenaran absolut sebagai miliknya, sementara kelompok-kelompok lain dianggap sesat dan tidak punya hak untuk ada. Kita dapat mengatakan bahwa sikap-sikap fundamentalistis dan fanatis yang cepat berubah menjadi agresif dan destruktif itu lebih banyak bersumber pada pengabaian keadilan distributif, maka tak jarang uang dan politik

⁹ Mohammad Burhanudin, *loc. cit.*

¹⁰ *Ibid.*

menjadi latar belakang hadirnya sikap-sikap itu, dan sangat jarang pula sikap-sikap negatif itu dilakukan secara murni untuk alasan-alasan religius.¹¹

Dalam satu dekade terakhir, kita juga melihat sepak terjang organisasi keagamaan yang fundamentalis dan bahkan cenderung ekstrimis dalam menjalankan aktivitasnya. Mulai dari merazia tempat prostitusi, pub, café, hingga menutup rumah-rumah ibadah milik kelompok minoritas. Mereka bergerak laksana preman-preman dengan menggunakan medium kekerasan. Merekrut orang-orang miskin hingga kelas menengah perkotaan yang tersingkir dari persaingan ekonomi yang kian tak menguntungkan wong cilik. Situasi psikologis masyarakat yang penuh tekanan dan perasaan frustrasi karena ketersingkirkan tersebut memudahkan perekrutan. Terlebih dengan penggunaan simbol-simbol keagamaan. Selain itu, rasa frustrasi sangat mudah diorganisir untuk diarahkan sebagai sebuah kekuatan massa dengan psikologi jalanan yang kapan pun siap dimobilisasi atas nama dogma dan ketaatan kepada tokoh spiritual organisasi itu. Situasi psikologis dalam ketersingkirkan dan frustrasi ini juga mudah menjadi ladang bagi kelompok jaringan teroris untuk merekrut kader-kader militan guna menjalankan aksi-aksi terornya.¹²

3.1.3 Kapitalisme Agama di Ruang Publik

George Ritzer dalam bukunya *Ketika Kapitalisme Berjingkrang* sebagaimana dikutip oleh Max Regus, mengatakan bahwa kapitalisme telah mewajah dalam sekian banyak operasi sosial, politik dan ekonomi yang tidak dapat diperkirakan. Kapitalisme telah mampu menyapu zaman dengan mentalitas kebudayaan yang sulit dipastikan. Sejalan dengan kegoyahan ini, ukuran-ukuran modal (kapital) akan menentukan pandangan dan apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah peradaban.¹³ Dalam satu dasawarsa terakhir, ruang publik kita dikuasai oleh dua kekuatan fundamentalis utama, yaitu fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Kontestasi keduanya sangat mengemuka. Walaupun keduanya bermain dalam tatanan simbolis yang berbeda, mereka mempunyai sasaran yang sama yang hendak direbut, yaitu khalayak atau orang banyak.

Di dalam masyarakat yang terglobalisasi secara ekonomis seperti Indonesia, kekuatan-kekuatan pasar kapitalis bersifat destruktif bagi solidaritas sosial. Fanatisme agama kerap merupakan respons atas krisis solidaritas dan marginalisasi yang ditimbulkan oleh ekspansi

¹¹ F. Budi Hardiman, "Konsep Habermas tentang Masyarakat Postsekular", *Jurnal Ledalero*, 10:1 (Ledalero, Juni 2011), hlm. 16.

¹² Mohammad Burhanudin, *loc. cit.*

¹³ Max Regus, "Dialog Agama dan Filsafat dalam Ruang Postmodernisme: Menggagas Kemanusiaan sebagai Metanarasi Akhir", *Jurnal Ledalero*, 4: 2 (Ledalero, Desember 2005), hlm 80.

pasar itu.¹⁴ Misalnya tren kultur keislaman baru yang meluas serta menjadi bagian budaya populer ini kemudian dalam praktiknya lebih banyak dimanfaatkan kekuatan kapitalis, baik lokal maupun internasional untuk mendapatkan khalayak Islam yang sangat besar itu sebagai pasar mereka. Salah satu contohnya ialah tentang perselisihan tajam di ruang publik mengenai perlu tidaknya label halal untuk produk-produk busana muslim. Sebagai misal, produk-produk kecantikan, busana muslim, dan segala pernik-aksesoris keislaman, bisnis marketing berantai, hingga paket perjalanan umrah. Pelaku-pelaku pasar kerap memanfaatkan pandangan tertentu dalam Islam untuk kepentingan pasar produk-produk mereka. Situasi ini rawan berbenturan dengan pandangan Islam lain, yang memang sangat beragam. Tanpa disadari, di situ kelompok-kelompok bercorak fundamentalis akan muncul.

3.2 Fundamentalisme Agama sebagai Buah dari Benturan Antarperadaban

Perkembangan dunia yang bergerak dari tingkatan yang paling rendah atau sederhana menuju tingkatan yang paling tinggi atau kompleks lazimnya dinamakan peradaban. Kalau peradaban itu hendak dikontemplasikan maka tentangnya akan dikatakan tidak lain sebagai kenyataan historis umat manusia.

Ramalan Huntington tentang “benturan peradaban” (*clash of civilisations*) nampaknya dibenarkan oleh adanya benturan antara Islam melawan Kristen, Katolik melawan Kristen, Hindu melawan Katolik, dan lain-lain (*clash among religious believers*) di pelbagai belahan dunia. Konflik yang berdampak negatif untuk pembangunan itu juga terjadi di kala fanatisme agama (budaya dan peradaban tertentu pun) cenderung mengkafirkan agama lain dan kebudayaan lokal.¹⁵ Pergesekan-pergesekan antaragama telah memicu munculnya krisis sosial yang hebat, pelemahan integritas nasional, menguatnya instabilitas politik dan pelumpuhan peradaban. Ada proses ‘pengkerdilan’ religiositas baik dilakukan oleh agama maupun oleh institusi-institusi sosial lain (negara). Dengan intensi mempertahankan kemapanan, pergesekan antaragama tersebut juga berdaya mengkotak-kotakkan masyarakat atas dasar pandangan yang bercorak fundamentalis terhadap agama. Sangat jelas bahwa kerusakan substansi kehidupan keberagaman diakibatkan oleh membesarnya pola penyempitan relasi dan interaksi sosial oleh institusi agama. Institusi-institusi agama kita semakin meminggirkan kesadaran akan realitas

¹⁴ F. Budi Hardiman, *op. cit.* hlm. 22.

¹⁵ Philipus Tule, *op. cit.*, hlm. 397.

pluralisme religius, dari mana sebenarnya mereka niscaya merancang kontribusi konstruktif bagi kehidupan bangsa Indonesia.¹⁶

Pada hemat saya, Huntington terlalu memberi tempat yang berlebihan pada peran agama bagi terciptanya konflik. Bukan persaingan antara agama, bukan pula konflik yang lahir dari klaim-klaim mutlak agama-agama (monoteis) yang mengancam perdamaian, melainkan instrumentalisasi perasaan-perasaan religius melalui agitasi demi kepentingan politiklah yang menjadi penyebab terjadinya *clash of civilisations*. Namun tesis Huntington ini, saya pikir dapat membantu kita untuk memahami terjadinya fundamentalisme yang terjadi atas nama agama dengan lebih baik.

Inti pokok permasalahan antarperadaban sebetulnya adalah bahwa ada tendensi untuk mendominasi yang mewarnai hubungan antara dua peradaban, yaitu peradaban Barat yang kapitalistik di satu pihak dan peradaban Timur (Islam) yang dilandasi oleh agama. Tendensi tersebut ditopang oleh satu keyakinan yang fundamentalis-dogmatis, bahwa masing-masing peradaban memiliki opsi yang terbaik bagi jalannya sejarah dan karenanya layak untuk diglobalisasikan jika perlu diuniversalisasikan.¹⁷ Di sini sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan dua jenis fundamentalisme yaitu fundamentalisme berkarakter ekonomistik sebagaimana yang terkandung dalam globalisasi di satu pihak, dan fundamentalisme agama di pihak lain.

Terhadap kondisi rivalitas antara kedua jenis fundamentalisme ini, ada beberapa penegasan yang perlu dibuat. *Pertama*, persaingan antara manusia, institusi, bidang kehidupan dan kebudayaan merupakan hal normal yang tak terhindarkan. Oleh sebab itu rivalitas antara kebudayaan atau peradaban dunia merupakan faktum yang positif. *Kedua*, persaingan antara peradaban dan atau kebudayaan mengandaikan kesetaraan hubungan. Tampaknya hal ini tidak terjadi, karena hubungan antara peradaban Barat dan Timur (Islam) bercorak asimetris: dengan keunggulan ekonomi dan teknologi peradaban Barat hampir secara sepihak menentukan arah globalisasi. Hal demikian akan menimbulkan ketergantungan struktural dari negara-negara berkembang (peradaban Timur). *Ketiga*, kedua kubu tidak serius menyatakan penolakan aspek kekerasan (fisik, psikis, sosial-ekonomis) di balik upaya keduanya menjadikan globalisasi sebagai instrumen ekspresi diri.¹⁸ *Keempat*, persaingan antara kedua peradaban ditandai oleh

¹⁶ Max Regus, *Republik Sialan-Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan* (Maumere: Ledaero, 2003), hlm. 245.

¹⁷ Mathias Daven, "Arus Balik: Gerakan Fundamentalisme dalam Islam", *Jurnal Ledaero*, 13:2 (Ledaero, Desember 2014), hlm. 272.

¹⁸ Di satu pihak, kaum fundamentalis Islam tidak jarang menggunakan kekerasan sebagai instrumen mewujudkan misinya, sekali pun diakui bahwa sebagian besar kaum fundamentalis Islam menolak cara-cara kekerasan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Di pihak lain, salah satu dimensi pokok hubungan antara peradaban Barat dan

keangkuhan di pihak peradaban Barat dan sekaligus menyebabkan bertambahnya rasa harga diri dan perlawanan di pihak peradaban Timur (Islam).

3.3 Peran Agama-Agama dalam Menghadapi Fenomena Fundamentalisme Agama: Sebuah Sumbangan bagi Peradaban Manusia

Kehancuran peradaban sama dengan kehancuran manusia. Di bawah bayang-bayang eksklusivisme, fanatisme, primordialisme, dunia telah tersekat-sekat dan menjadi ancaman bagi peradaban. Di Indonesia, isu agama tampak menjadi yang paling sensitif. Ia sangat kuat dan mudah memprovokasi manusia untuk bertindak diskriminatif, dominatif, represif dan destruktif. Inilah warna kelam peradaban. Fenomena fundamentalisme menyiratkan pertanyaan bagi kita: efektifkah perlawanan atas nama Tuhan dan atas nama agama? Manusiawikah memberangus fundamentalisme berbasis agama? Bagaimana semestinya masyarakat pluralis harus hidup di Indonesia?

Di zaman yang semakin sekular ini, agama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Agama mengambil bagian pada saat-saat yang paling penting dan pada pengalaman-pengalaman hidup. Agama juga memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita. Agama-agama memberi ruang bagi kenyataan plural hidup bermasyarakat. Namun ada kenyataan bahwa ternyata tidak mudah juga memaknai pluralitas agama secara positif. Kita tidak dapat menyangkal kemunculan masalah-masalah yang tidak sederhana.

Semua agama adalah sama. Agama-agama adalah alat atau jalan yang berbeda, tetapi menuju arah yang sama. Ini adalah keyakinan yang populer sekali, baik di kalangan intelektual maupun masyarakat sederhana. Dengan keyakinan dan pemahaman ini, tentu kita mampu menggerakkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mengembangkan serta menghidupkan nuansa dialog, baik dalam komunitas kita sendiri, maupun-dan yang lebih penting lagi-komunikasi lintas agama.

Pada posisi yang lebih mungkin, kita memproklamasikan bahwa kita (baca: kaum beragama) harus siap sedia menjalin dialog dengan kaum beragama lain. Sebab, prinsip dialog adalah membangun perdamaian satu sama lain. Dialog yang dijalin tanpa pamrih, objektif, tulus, dengan sendirinya menjadi kondisi yang menguntungkan sekaligus menumbuhkan perdamaian. Dialog menyingkirkan kepura-puraan, persaingan, tipu daya dan pengkhianatan

Timur (Islam) bisa diungkapkan secara agak tepat dengan konsepsi kekerasan struktural: struktur-struktur dan mekanisme-mekanisme internasional, terutama di bidang ekonomi atau keuangan, mengandung kecenderungan bahwa "pihak yang kuat" hampir tidak akan berbuat apa-apa bagi "pihak yang lemah". *Ibid.*, hlm. 273.

serta sekaligus mencegah pertikaian. Sikap dialogis menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai dari sebuah dialog. Dialog bukan sekadar berkomunikasi dengan orang lain, melainkan lebih untuk saling memahami setiap perbedaan dan persamaan dalam agama-agama yang majemuk.¹⁹ Sikap toleran terhadap mereka yang berbeda agama sangat sejalan dengan ajaran iman setiap agama dan selaras pula dengan nalar murni umat manusia.

Lebih lanjut, relasi antara agama dan negara harus diinterpretasi sedemikian rupa secara terus-menerus sehingga dapat menyantuni fenomena pluralisasi masyarakat modern Indonesia. Sebab dalam politik dan ruang publik yang plural, kita tidak dapat merumuskan kebenaran keyakinan tertentu secara final. Klaim bahwa kita sanggup merumuskan kebenaran dan identitas secara final di ruang publik merupakan awal dari fundamentalisme yang merongrong asas keadilan.²⁰ Tentang ini, negara dalam hal ini pemerintah perlu mengambil sikap di hadapan berbagai kelompok warganya.

Asas “netralitas” merupakan strategi untuk menghadapi kemajemukan cara hidup. Asas ini menyatakan bahwa pemerintah dan aparat-aparatnya harus bersikap netral terhadap berbagai pandangan agama yang saling bersaing. Netralitas di sini bukan berarti sikap pasif ataupun permisif jika terjadi konflik kelompok ataupun penindasan terhadap kelompok minoritas agama, misalnya dalam bentuk diskriminasi, pengejaran, pembakaran rumah ibadat, dan sebagainya. Netralitas pasif seperti ini justru tidak netral, sebab dengan membiarkan penindasan terjadi, negara dapat dianggap memihak kelompok penindas. Netralitas harus diartikan sebagai sikap proaktif menjamin kebebasan agama untuk semua golongan. Tercakup dalam sikap proaktif itu, menindak tegas para pelanggar hak kebebasan beragama. Suatu toleransi terhadap intoleransi adalah sebuah kejahatan karena dengan sikap itu negara sebenarnya memihak penindasan terhadap warganya sendiri.²¹

Selain itu, tugas semua lembaga agama adalah menyiapkan kader tokoh agama yang militan (bukan radikal) dan yang memiliki spiritualitas berbasiskan “cinta kasih” sebagaimana diamanatkan dalam Injil, Quran dan aneka Kitab Suci agama-agama di Indonesia. Nilai moral dan etika religius dibangun di atas basis spiritualitas lintas agama dan kepercayaan. Kebenaran itu terungkap dalam banyak ayat dengan aneka nilai seputar cinta: kasih, kesabaran, kesopanan, dan lain-lain. Gerakan ‘akulturasi’ yang dicanangkan beberapa agama pada lima dekade terakhir ini telah menyuburkan semangat *dialogue of civilizations*, termasuk dalam bentuk pengakuan akan ‘otonomi agama-agama’ dan ‘otonomi budaya’, tetapi serentak pula

¹⁹ Rikard Kristian Sarang, *op. cit.*, hlm. 92.

²⁰ Silvano Keo Bhagi, *Negara Bukan-Bukan?* (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 221.

²¹ F. Budi Hardiman, *op. cit.* hlm. 19-20.

membangun relasi kebudayaan dengan agama lewat aneka proyek adaptasi dan inkulturasi.²² Setiap otonomi agama itu tidak mutlak tetapi senantiasa berelasi dengan pelbagai ranah kehidupan manusia lainnya. Untuk mencapai level agama yang demikian, kita perlu membebaskan diri dari tendensi profanasi dan desakralisasi agama-agama dalam aneka bentuk seperti politisasi agama, instrumentalisasi agama, menyamakan wahyu agama dengan rumusan teologis yang akhirnya membuahkan fenomena fundamentalisme dan fanatisme sempit.

4. Penutup

Agama dihidupi oleh manusia yang secara kodrati ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, agama yang kita kenal dan bahkan anut sekarang harus kita lihat sebagai dua hal, yaitu sebagai sistem kepercayaan yang bersifat personal dan sebagai institusi yang hadir di wilayah publik.²³ Agama sebagai sistem kepercayaan yang personal lebih menekankan pada hubungan pribadi pada oknum yang dipercayai sebagai Tuhan yang mestinya nilai dari hubungan pribadi itu memberi isi yang positif bagi manusia dalam menjalani kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang merupakan kenyataan di sekitar hidupnya. Di sini agama adalah sistem nilai yang menjadi spirit bagi manusia untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang hidup. Jika agama dimaksudkan untuk mengeluarkan komunitas manusia dari situasi ‘kejahiliahan’ ke situasi ‘berperadaban’, dari situasi ‘gelap’ ke situasi ‘terang’, maka tidak mungkin doktrinnya-doktrinnya bersifat tidak koheren. Dalam hal ini, maka haruslah dicari dalam pola-pola bagaimana doktrin-doktrin tertentu diinterpretasikan, khususnya yang berkaitan dengan soal sosial kemasyarakatan.²⁴

Kesadaran fundamentalisme menganggap masa kini telah terkotori sehingga cara membersihkannya adalah dengan menghidupkan kembali ajaran fundamental agama, termasuk dengan mengabaikan keniscayaan bahwa umat beragama saat ini telah hidup dengan nilai baru yang plural dan heterogen. Namun pertanyaannya, ajaran fundamental macam mana yang mau dipertahankan? Toh mereka malah menolak penafsiran baru dalam agama dan anti-intelektualisme, melecehkan konsep-konsep baru seperti pluralisme, toleransi antarumat beragama, dan demokrasi. Kaum fundamentalis berpikir bahwa masa lalu sebagai masa yang dekat dengan lahirnya agama merupakan masa yang telah teridealisasi dengan sendirinya dan harus dipertahankan. Kelompok fundamentalisme menolak istilah pembaruan agama.

²² Philipus Tule, *op. cit.*, hlm. 397-398.

²³ Cahaya Simbolon, “Indonesia: Mencintai Negara = Mencintai Pluralitas Agama”, *Jurnal Fenomena*, 8:1 (Yogyakarta: 2011), hlm. 65.

²⁴ Bahtiar Effendy, “Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia”, dalam S.P.Lili Tjahjadi (Ed.), *Agama dan Demokratisasi: Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 89.

Patut ditegaskan bahwa pluralitas agama yang ada sekarang ini telah menjadi satu keniscayaan dan mendesak agama-agama (apapun itu) untuk menghadapi dan mengubah paradigma teologinya. Semua agama tidak hanya didesak untuk memikirkan sikap praktis yaitu secara bebas ‘bergaul’ dengan agama lain, tetapi juga berani memahami secara teologis apa makna kehadiran agama dan kepercayaan lain. Sebagai bangsa yang besar dengan aneka komunitas religius, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham pluralisme dalam beragama. Di sini, pluralisme perlu dipahami sebagai sikap menjunjung tinggi dan toleran terhadap eksistensi agama-agama lain. Artinya, keberadaan agama-agama berkaitan dengan penggunaan akan hak setiap orang untuk menentukan agamanya. Melihat realitas seperti ini, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan komunitas religius yang dialogis, yaitu komunitas yang mampu mengayomi perbedaan (teologis) dari setiap agama.

Pada akhirnya, dalam hidup bersama sebagai bangsa yang plural, kita semua hendaknya selalu berefleksi bahwa kita sejatinya dipersatukan bukan karena kita dahulu telah memiliki agama dan suku yang sama, melainkan kita bersatu karena kita berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bhagi, Silvano Keo. *Negara Bukan-Bukan?*. Maumere: Ledalero, 2016

Effendy, Bahtiar. “Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia”, dalam S.P.Lili Tjahjadi (Ed.), *Agama dan Demokratisasi: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero, 2017.

Nu’ad Ismatillah A., *Fundamentalisme Progresif*. Jakarta: Panta Rei, 2005.

Regus, Max. *Republik Sialan-Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan*. Maumere: Ledalero, 2003.

Saenong, Ilham B.. *Hermeneutika Pembebasan-Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut Hassan Hanafi*. Jakarta: TERAJU, 2002.

Tule, Philipus. “Agama-Agama di Indonesia Menghadapi Tantangan Radikalisme dan Globalisasi” dalam Paul Budi Kleden, dkk. (Ed.), *Allah Menggugat-Allah Menyembuhkan*. Maumere: Ledalero, 2012.

ARTIKEL DAN MANUSKRIP

Daven, Mathias. “Arus Balik: Gerakan Fundamentalisme dalam Islam”, dalam *Jurnal Ledalero* vol. 13, no. 2, Desember 2014. Maumere: Ledalero, hlm. 263-264.

Hardiman, F. Budi. “Konsep Habermas tentang Masyarakat Postsekular”, dalam *Jurnal Ledalero* vol. 10, no. 1, Juni 2011. Maumere: Ledalero, hlm. 16.

Mathewson, Denny F. “The Fundamentalism Project: An Islamic Studies Scholar’s Perspective”, dalam *Religious Studies Review* vol. 24, no. 1, 1998.

Regus, Max “Dialog Agama dan Filsafat dalam Ruang Postmodernisme: Menggagas Kemanusiaan sebagai Metanarasi Akhir”, dalam *Jurnal Ledalero* vol. 4, no. 2, Desember 2005: Maumere: Ledalero, hlm 80.

Sarang, Rikard Kristian. “Dialog Antaragama sebagai Model Penerimaan, Pengakuan terhadap Keberagaman dalam Terang Pemikiran Paul F. Knitter”, dalam *Jurnal Berbagi* vol. 2, no. 1, Januari 2013. Maumere: Ledalero, hlm. 78.

Simbolon, Cahaya. “Indonesia: Mencintai Negara= Mencintai Pluralitas Agama”, dalam *Jurnal Fenomena* vol. 8, no. 1, 2011. Yogyakarta: Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, hlm. 65.

SURAT KABAR

Burhanudin, Mohammad. “Intoleransi, Setan yang Tak Sendirian”, *Kompas*, 2 Maret 2016.

Fasya, Teuku Kemal. “Pluralisme Vs Fundamentalisme”. *Kompas*, 14 Februari 2011.

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen, “Amartya Sen”, diakses 23 Maret 2017.